

## **BAB III**

### **KONFLIK GEORGIA DAN RUSIA**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang gambaran konflik Georgia – Rusia, dimulai dari sejarah konflik yang terjadi antara Georgia dan Ossetia Selatan sebagai negara bagian dari Georgia yang ingin melakukan tidak separatisme, sampai pada keterlibatan Rusia dan berubah menjadi konflik antara Georgia dan Rusia pada tahun 2008.

Bab ini akan dibagi menjadi dua bagian. Sub bab pertama akan berisi tentang sejarah terjadinya konflik antara Georgia dan Ossetia Selatan. Sub bab kedua akan membahas tentang konflik yang bergeser menjadi konflik antara Georgia dan Rusia di tahun 2008.

#### **A. Awal Konflik Georgia – Ossetia Selatan**

Pada tanggal 9 April 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet, Georgia mendeklarasikan kemerdekaannya dengan ibukota Tblisi. Georgia adalah sebuah negara yang terletak di wilayah Kaukasus, sebelah timur Laut Hitam. Georgia berbatasan langsung dengan Rusia di sebelah utara, berbatasan dengan Azerbaijan di sebelah timur dan berbatasan dengan Armenia dan Turki di sebelah selatan. Wilayah Georgia yang terdiri atas 12 provinsi. Mayoritas penduduk Georgia adalah etnis Georgia dengan total penduduk 4.5 juta jiwa dan wilayah yang kecil yakni 69.700 km (Central Intelligence Agency, 2016). Sebagai salah satu negara bekas komunis, Georgia mengalami berbagai masalah seperti krisis ekonomi dan konflik internal pada awal-awal kemerdekaannya. Salah satu konflik internal yang terjadi adalah konflik sipil antara pemerintah Georgia dan daerahnya yaitu Ossetia Selatan. Ossetia Selatan adalah daerah otonomi yang sebagian besar penghuninya adalah masyarakat asli Ossetia atau yang disebut sebagai Ossetian (Global Security,

2011).

**Gambar 3.1**

**Peta Georgia**



Sumber: Central Intelligence Agency (<https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/gg.html>)

**Gambar 3.2**

**Peta Eropa**



Sumber: World Atlas

(<http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/eu.htm>)

Ossetian adalah sebuah kelompok etnis dari Ossetia. Ossetia adalah sebuah daerah yang terletak di Pegunungan Kaukasus Utara di Eropa dengan jumlah penduduk yang berjumlah 70.000 jiwa. Bahasa yang dipakai oleh masyarakat Ossetia adalah bahasa Ossetic. Pada tahun 1920, Uni Soviet membagi kawasan Ossetia menjadi dua yaitu Ossetia Utara yang bergabung dengan Rusia dan Ossetia Selatan dengan Georgia. Konflik besar pertama yang terjadi antara Georgia dan Ossetia Selatan berlangsung pada 1918-1920. Konflik dimulai dari serangkaian pemberontakan yang dilakukan *Ossetians* di daerah yang mereka huni. Pemberontakan tersebut dilatarbelakangi oleh penentangan terhadap *Transcaucasian Democratic Federative Republic* (TDFR). TDFR adalah negara

yang terdiri dari Armenia, Azerbaijan, dan Georgia di kawasan Kaukasus. Pada 26 Mei 1918, Georgia menyatakan merdeka dan dua hari setelahnya Armenia dan Azerbaijan pun turut menyatakan merdeka. Hal tersebut menjadi tanda berakhirnya TDFR. Secara keseluruhan, pada tahun 1980 penduduk di Ossetia Selatan adalah 66 persen Ossetian dan 29 persen Georgian. Kemudian pada 1989 lebih dari 60 persen Ossetian yang berada di Georgia tinggal di luar Ossetia Selatan. Tidak seperti konflik lainnya yang terjadi di kawasan Kaukasus, Georgia dan Ossetia Selatan tidak mempunyai batas yang jelas, dan terdapat sedikit hambatan budaya (Global Security, 2011).

Revolusi 1917 membuat kelompok Menshevik menguasai Georgia dan kelompok Bolshevik menguasai Moskow yang saling berseberangan. Kelompok Menshevik bersama Georgia menyatakan kemerdekaan Republik Demokratik Georgia pada 26 Mei 1918<sup>1</sup> dengan memanfaatkan posisi kelompok Bolshevik yang lebih lemah darinya. Akibat dari pernyataan kemerdekaan tersebut, Ossetia Selatan terpisah dari Ossetia Utara. Ossetia Selatan merasa diperlakukan secara diskriminatif oleh Georgia dan ingin bergabung kembali dengan Ossetia Utara. Tetapi hal tersebut dianggap oleh Georgia sebagai dukungan terhadap kelompok Bolshevik. Dan akhirnya terjadilah konflik etnis pada tahun 1918 hingga 1921 ketika pemerintah Georgia menuduh Ossetia Selatan yang beberapa kali melakukan pemberontakan telah bekerja sama dengan Rusia. Georgia segera mengirimkan pasukannya ke daerah Tskhinvali yaitu ibukota Ossetia Selatan, untuk menghentikan pemberontakan Ossetia Selatan. Akibat dari itu, sekitar 5.000 etnis Ossetia meninggal dan lebih dari 13.000 penduduk sipil mati akibat kelaparan dan wabah penyakit (International Crisis Group, 2004, p. 3).

Konflik kembali memanas saat adanya permintaan dari South Ossetian Popular Front (*Ademon Nykhas*) untuk diberikan Otonomi Republik pada tahun 1990 dari

---

<sup>1</sup> Kemerdekaan tersebut tidak bertahan lama dan pada 25 Februari 1921, Uni Soviet menduduki Georgia kembali sebelum resmi dinyatakan merdeka oleh Uni Soviet pada 9 April 1991

Georgia dan permintaan tersebut dikabulkan. *Ademon Nykhas* dibentuk pada tahun 1988 yang bertujuan untuk memperkuat persatuan wilayah Ossetia Selatan menjadi Otonomi Republik. Di tahun yang sama, Georgia membuat langkah langkah baru dalam pemerintahannya, yakni Mahkamah Agung Georgia menyatakan untuk menggunakan bahasa Georgia sebagai bahasa nasional yang wajib digunakan di seluruh wilayah Georgia. Namun demikian puncak dari awal konflik yang sebenarnya adalah ketika Mahkamah Agung Georgia mengesahkan adanya pembatasan perkumpulan partai politik di wilayah regional Georgia. Pengesahan kebijakan ini dari Mahkamah Agung Georgia dianggap sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap berdirinya *Ademon Nykhas* yang berdiri untuk mewadahi kepentingan warga wilayah Ossetia Selatan. Sehingga, Ossetia Selatan memutuskan untuk melakukan protes terhadap Georgia dengan melakukan deklarasi kemerdekaan dan menyatakan diri sebagai Republik Demokratik Ossetia Selatan pada tanggal 20 September 1990 (International Crisis Group, 2004, p. 4)

Zviad Gamsakhurdia sebagai presiden terpilih Georgia pada waktu itu menyatakan bahwa pemilihan umum yang dilakukan oleh Ossetia Selatan tidak berdasar dan memutuskan untuk menghapus segala status otonomi yang semula diberikan pada Ossetia Selatan. Menurutnya warga Ossetia Selatan tidak memiliki hak untuk melakukan pemilihan sendiri karena warga Ossetia Selatan merupakan warga minoritas nasional dan merupakan pendatang baru yang semula berasal dari Ossetia Utara yang wilayahnya tergabung dalam Rusia. Aksi diplomatis tersebut disusul oleh aksi militer dari Georgia. Militer Georgia langsung menduduki pusat kota Tskhinvali, Ossetia Selatan. Setelah mengetahui konflik tersebut, Kementerian dalam negeri Rusia segera mengunjungi Ossetia Selatan. Hal tersebut dilakukan pemerintah Rusia karena Georgia dan Ossetia Selatan adalah negara yang pernah berada dibawah kekuasaan Uni Soviet. Pada tahun 1991, Uni Soviet runtuh dan menyebabkan munculnya negara-negara baru. Negara-

negara baru bekas Uni Soviet yaitu Rusia, Ukraina, Belarus, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Lithuania, Latvia, dan Estonia (BBC News Europe, 2011). Setelah Uni Soviet runtuh, Rusia menyatakan diri sebagai negara penerus Uni Soviet dan secara otomatis mewarisi kursi tetap di Dewan Keamanan PBB (Value Walk, 2015). Rusia pun menyebut 15 negara pecahan Uni Soviet sebagai *near abroad*. *Near abroad* adalah negara-negara yang diakui kemerdekaannya oleh Rusia, tetapi negara-negara tersebut tetap dianggap bagian dari Rusia (Encyclopedia of Russian History, 2004)

Pasca Uni Soviet runtuh, Tskhinvali terbagi dua yang dikuasai oleh pasukan militer Georgia dan militan Ossetia Selatan. Presiden Gamsakhurdia dengan kepemimpinan yang semakin otoriter membuat sekutunya ingin memberontak dan bergabung dengan pihak oposisi. Para pemberontak mulai menguasai Tbilisi dan mendorong Presiden Gamsakhurdia untuk menurunkan jabatannya. Mulai saat itu, Georgia berada didalam kondisi krisis karena pemberontakan tersebut. Dengan kondisi yang semakin rumit, pemberontak membuat Dewan Negara untuk membantu menjalankan fungsi pemerintahan. Usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Dewan Negara memutuskan untuk meminta Eduard Shevardnadze, mantan Menteri Luar Negeri Uni Soviet dibawah pemerintahan Mikhail gorbachev tahun 1985 untuk memimpin Georgia dan mengatasi krisis yang terjadi di Georgia . Rusia pada saat itu merasa bahwa krisis internal yang terjadi di Georgia perlu untuk diintervensi. Hal ini membuat konflik internal Georgia semakin meningkat. Kemudian pemimpin Georgia dan Rusia sepakat melakukan gencatan senjata agar konflik tidak meluas. Pada 22 Juni 1992 di kota Sochi, Rusia, keduanya menandatangani perjanjian untuk melakukan gencatan senjata. Rusia dan Georgia juga membangun pasukan penjaga perdamaian yang disebut *Joint Peace Keeping Force* (JPKF). JPKF terdiri dari perwakilan personil dari Georgia, Rusia dan

Ossetia Selatan maupun Ossetia Utara. JPKF berhasil menghindari konflik internal Georgia kembali terjadi. Namun JPKF hanya bertahan hingga 2004 saat konflik antara Georgia dan Ossetia Selatan kembali memanas akibat beberapa perubahan domestik Georgia (International Crisis Group, 2004, p. 4).

Sejak dimulainya perselisihan antara Ossetia Selatan dengan Georgia yakni pada tahun 1989 hingga Juli 1992 telah menyebabkan 3.000 nyawa melayang, 40.000 orang mengungsi ke Ossetia Utara dan Abkhazia, serta 100 desa lebih telah dihancurkan atau dikuasai oleh pasukan Georgia (All World War, 2008).

## **B. Konflik Georgia dan Rusia tahun 2008**

Pada tahun 2004, seiring dengan naiknya Mikheil Saakashvili ke tahta pemerintahan Georgia pasca penggulingan Presiden Eduard Shevardnadze pada Revolusi Mawar di Georgia, gerakan agar Georgia dapat kembali mendapatkan kuasa atas Ossetia Selatan kembali dilakukan. Mikheil mengatakan bahwa segala cara akan ditempuhnya dan dibicarakan demi tercapainya kesatuan Georgia (All World War, 2008).

Selain dengan Ossetia Selatan, permasalahan antara Rusia dan Georgia juga semakin mencuat. Hal ini berkaitan dengan tuduhan dari Georgia terhadap Rusia yang memberikan bantuan kepada Ossetia Selatan beserta pasukan yang dianggap pemberontak oleh Georgia dalam bentuk bantuan ekonomi, logistik, dan lain sebagainya. Tindakan ini sangat mengganggu Georgia karena dianggap sebagai sebuah pengkhianatan atas kesepakatan untuk menjadi netral atas nama pasukan penjaga perdamaian yang terdiri dari Georgia, Ossetia Selatan, dan Rusia.

Permasalahan yang juga menjadi pemicu meletusnya kembali perang antara Ossetia Selatan dan Rusia dengan Georgia adalah pertama pada 2006 presiden terpilih Ossetia Selatan sangat meminta kembali untuk memisahkan diri dari Georgia melalui

referendum, namun ditolak oleh perdana menteri Georgia. Bahkan Georgia menganggap bahwa aksi ini merupakan sebuah aksi yang mendapat dukungan dari Rusia yang ingin menyulut perang dengan Georgia (BBC News, 2013). Kedua adalah pengakuan kedaulatan Kosovo oleh dunia internasional pada tanggal 18 Februari 2008 membuat Ossetia Selatan berpikir untuk kembali memperjuangkan kemerdekaannya. “Jika Kosovo mampu untuk diakui kemerdekaannya, lalu mengapa tidak untuk Ossetia Selatan” (Tran, 2008).

Sejak permintaan kembali Ossetia Selatan terhadap kemerdekaannya melalui referendum ditolak oleh Georgia, telah banyak kejadian-kejadian pada level perbatasan di Ossetia Selatan dan Georgia yang memicu ketegangan satu sama lain, seperti penembakan oleh penembak jitu Ossetia Selatan terhadap Georgia serta pemboman terhadap polisi Georgia yang sedang patroli oleh orang-orang Ossetia Selatan, begitu juga sebaliknya.

Puncak ketegangan mulai terasa manakala Georgia mulai mengerahkan pasukannya di perbatasan Georgia dan Ossetia Selatan guna meredam kekacauan yang ada selama 2006 hingga 2008. Hingga pada Agustus 2008 terjadi perang Georgia dan Ossetia Selatan yang ditandai dengan penyerangan dari pasukan Georgia ke Tskhinvali ibukota Ossetia Selatan. Serangan pun mendapat balasan dari pasukan tentara Ossetia Selatan.

Rusia, sebagai sebuah negara yang turut serta sebagai pasukan penjaga perdamaian berdasarkan perjanjian sebelumnya pun turut andil. Namun posisinya saat ini bukan lagi sebagai pasukan perdamaian melainkan sebagai pihak yang mendukung Ossetia Selatan guna melawan Georgia. Hal ini berkaitan dengan banyaknya warga Ossetia Selatan yang memiliki identitas berupa paspor Rusia. Sehingga Rusia merasa perlu untuk melindungi warganya yang berada di Ossetia Selatan (Tran, 2008).



Pertempuran yang berlangsung selama lima hari, pasukan Rusia berhasil mengambil alih kota Tskhinvali dan memukul mundur pasukan Georgia. Bahkan pasukan Rusia sudah bersiap untuk menghancurkan lebih dalam lagi pasukan Georgia. Namun hal ini tak terjadi, akibat banyaknya protes yang dilontarkan dari internasional (BBC News, 2013). Selain itu, dari pihak Georgia sendiri juga telah menarik pasukannya dari lini depan peperangan guna mengantisipasi serangan pasukan Rusia yang kemungkinan besar menyasar Tbilisi. Banyak korban jiwa yang timbul akibat perang lima hari tersebut.

Tepat pada 10 Agustus 2008 Rusia telah secara resmi menyatakan diri untuk menarik semua pasukannya. Walaupun dari sisi Georgia juga mengatakan hal serupa, namun beberapa serangan ditujukan kepada Ossetia Selatan perbatasan dan Rusia masih dilakukan. Pada 26 Agustus 2008 Rusia secara resmi mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa Rusia mengakui kedaulatan Ossetia Selatan (All World War, 2008). Pengakuan kedaulatan ini juga diikuti oleh beberapa negara aliansi Rusia diantaranya adalah Nikaragua, Venezuela, Nauru dan Tuvalu.

### Gambar 3.1

## Dokumen Dekrit Pengakuan Kedaulatan Rusia Atas Ossetia Selatan



### УКАЗ

#### ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

##### О признании Республики Южная Осетия

1. Учитывая волеизъявление югоосетинского народа, признать Республику Южная Осетия в качестве суверенного и независимого государства.
2. Министерству иностранных дел Российской Федерации провести с Югоосетинской Стороной переговоры об установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими документами.
3. Поручить Министерству иностранных дел Российской Федерации провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с Югоосетинской Стороной о подготовке проекта договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и представить в установленном порядке предложение о его подписании.
4. В связи с обращением Президента Республики Южная Осетия Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора, упомянутого в пункте 3 настоящего Указа, осуществление Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Республики Южная Осетия функций по поддержанию мира.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.



Президент  
Российской Федерации Д.Медведев

Москва, Кремль  
26 августа 2008 года  
№ 1261

Sumber: <http://document.kremlin.ru/page.aspx?1114437>